

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

Dyah Elyta Kristiantina, Sarwono, Bambang Santoso Haryono

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

E-mail: jadikanbidadaricemburu@gmail.com

Abstract: *Analysis of Government Policy of Blitar in Developing Region Potential For Improving Regional Competitiveness. Establishing policies of region potential development in order to improve competitiveness requires a clear insight about the potential of the region itself. Analysis tools used in this study are the Location Quotient (LQ) for determining the base and non-base sectors, shift share analysis (SSA) to determine region potential competitiveness, and policy advocacy using theory of sectoral policy approach. The analysis result shows that Blitar has the base sector namely trade and service sector, but has not had competitiveness, with the potential of tourism sector as a driver of the economy. In the system of sectoral policies, policy advocacy for improving the competitiveness of the services and trade as a base sector can be done by developing non-base sector as the supporting sector, which is tourism sector. Development of the tourism sector activity can be done by increasing the number of tourist attractions based on the traditional, in this case is in line with the intention to build Blitar as national laboratories. Researchers contribute policy advocacy of "Travel Month" for which in that month the activities of tourism are held in Blitar.*

Keywords: *policy advocacy, regional competitiveness, location quotient and shift share analysis*

Abstrak: **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam Mengembangkan Potensi Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah.** Menetapkan kebijakan pengembangan potensi daerah dalam upaya untuk meningkatkan daya saing memerlukan wawasan yang jelas tentang potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor-sektor basis dan non-basis, analisis *Shift Share* (SSA) untuk mengetahui daya saing potensi daerah, dan advokasi kebijakan menggunakan pendekatan teori kebijakan sektoral. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki sektor basis yaitu sektor jasa dan perdagangan, namun belum memiliki daya saing, dengan potensi sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian. Dalam sistem kebijakan sektoral, advokasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor basis, dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan sektor non-basis yang menjadi pendukung, yaitu sektor pariwisata. Pengembangan aktivitas sektor pariwisata dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek wisata berbasis wisata tradisional, yang dalam hal ini sejalan dengan tujuan menjadikan Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan. Peneliti memberikan advokasi kebijakan "Bulan Wisata" di mana pada bulan tersebut aktivitas-aktivitas kepariwisataan Kota Blitar digelar.

Kata kunci: *advokasi kebijakan, daya saing daerah, location quotient dan shift share analysis*

Pendahuluan

Dengan kekuasaan yang dimiliki, daerah dapat mengelola dan memecahkan masalah pembangunan di daerah, terbukanya peluang usaha untuk menggali potensi daerah dan pengembangan ekonomi

daerah untuk membangun daya saing, sehingga secara nasional dan global Indonesia dapat berkiprah dengan kemampuan daya saing yang kokoh dengan negara-negara lain.

Tantangan ini harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah sebagaimana yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat me-nurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”. Selanjutnya pada pasal 1 butir 6 yang berhubungan dengan pasal yang mengatur hak dan kewajiban daerah, dan pada salah satu point kewajiban daerah yang diatur dalam pasal 22 adalah “mengembangkan sumber daya produktif di daerah” (Sumihardjo, 2008, hal. 28).

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*location quotient*) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya atau daerah referensi (Daryanto dan Hafizrianda, 2010, hal.20). Dengan diketahuinya sektor unggulan sebagai potensi daerah, maka akan menjadi masukan untuk evaluasi kebijakan yang sudah ada apakah sesuai dengan keadaan potensi daerah sekaligus sebagai perencanaan kebijakan oleh pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sektor unggulan tersebut untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing.

Kota Blitar sebagai daerah otonom, di dalam RPJMD 2011-2015 disebutkan memiliki visi “Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan *Relegius* melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2015” dan dijabarkan pada salah satu misinya yaitu memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan yang mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa

serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitik-beratkan ke arah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, UMKM serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. (bappeda.kotablitar.go.id).

Tinjauan Pustaka

a. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pendekatan yang dapat dipakai pula dalam peyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dengan menggabungkan semua kepentingan atas, bawah, sektoral ataupun bidang yang diakomodir dan diselaraskan dalam sebuah perencanaan yang sistematis dan dinamis. Sistem perencanaan ini lebih bersifat simulasi dengan kendala tujuan target makro tetapi pelaksanaannya sesuai dengan tingkat bawah. Hasilnya menjadi perencanaan optimal antar pusat, daerah dan sektor yang dianggap sebagai isu utama nasional atau daerah (Hafizrianda dan Daryanto, 2010, hal. 4).

b. Advokasi Kebijakan

Aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut disebut dengan advokasi kebijakan. (Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003).

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan campuran, kualitatif dan kuantitatif.

b. Fokus Penelitian

- a. Nilai indeks LQ potensi ekonomi kota Blitar sebagai upaya peningkatan daya saing daerah
- b. Ketepatan Kebijakan Sektoral

- c. Nilai Indeks Analisis *Shift Share* potensi ekonomi jasa dan perdagangan
- d. Kebijakan Pengembangan Pariwisata
- e. Advokasi Kebijakan

c. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Blitar, Provinsi Jawa timur. Sedangkan situs penelitian ini adalah:

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Badan Pusat Statistik Kota Blitar

d. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti sebagai bahan analisis berdasarkan sumber pengambilannya yaitu data sekunder. Sedangkan sumber data yang diambil peneliti sebagai bahan analisis adalah dokumentasi.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang terdiri dari data pribadi dan data resmi. Dalam hal ini peneliti meneliti dokumen-dokumen yang termasuk di dalamnya Produk Domestik Regional Bruto kota Blitar dan Jawa Timur, data pemetaan investasi daerah, data alokasi dana SKPD Kota Blitar.

f. Metode Analisis Data

- *Location Quotient Analysis (LQ Analysis)*

Rumus perhitungan LQ:

$$LQ(\text{sektor } i) = \frac{X_{ir} / X_r}{X_{in} / X_n}$$

X = nilai
 i = sektor
 r = regional
 n = nasional atau daerah di atas r
 Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jika LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), merupakan sektor basis dan berpotensi

untuk ekspor, artinya spesialisasi kota/kabupaten lebih tinggi dari tingkat propinsi.

- b. Jika LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), merupakan sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat propinsi.
- c. Jika LQ sama dengan satu ($LQ = 1$), berarti tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat propinsi

- *Shift Share Analysis (SSA)*

Lahirnya konsep *shift share analysis* dalam analisis ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari perhitungan indeks konsentrasi seperti LQ.

Jika dituangkan dalam bentuk persamaan matematis menjadi:

$$\Delta Y^i = PR + PP + Y'^i - Y^i = Y^i (R_a - 1) + Y^i (R^i - R_a) + Y^i (r^i - R^i)$$

Dimana:

ΔY = perubahan dalam pendapatan subsektor

Y^i = PDRB subsektor pada tahun dasar provinsi

Y'^i = PDRB subsektor pada tahun akhir analisis provinsi

$R_a = Y' / Y$

$R^i = Y'^i / Y^i$

$r^i = Y'^i / Y^i$

Y = PDRB seluruh subsektor pada tahun dasar analisis provinsi

Y' = PDRB seluruh subsektor pada tahun akhir analisis provinsi

Y^i = PDRB subsektor pada tahun dasar analisis wilayah yang diteliti

Y'^i = PDRB subsektor pada tahun akhir analisis wilayah yang diteliti

Setelah melakukan analisis data tersebut maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Untuk menjawab fokus masalah yang ketiga peneliti menyajikan hasil analisis *LQ* dan *Shift Share* untuk melihat sektor basis dan non basis dan daya saing, membandingkan dengan data alokasi dana pengembangan daerah, pemetaan investasi daerah dan menganalisisnya dengan teori kebijakan sektoral, kemudian mencoba memberikan solusi kebijakan dengan menggunakan analisis data berdasarkan, inovasi kebijakan, advokasi kebijakan dan perubahan kebijakan. Selanjutnya akan dapat disimpulkan sebuah saran kebijakan yang dinilai tepat untuk pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.

Pembahasan

a. Nilai indeks LQ potensi ekonomi kota Blitar sebagai upaya peningkatan daya saing daerah

Berdasarkan perhitungan dengan rumus *LQ* maka dapat teridentifikasi secara keseluruhan mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 sektor-sektor mana yang terdapat di kota Blitar yang merupakan sektor basis dan non basis. Sektor basis kota Blitar yaitu konstruksi (1,14); perdagangan, hotel dan restoran (1,02); pengangkutan dan komunikasi (2,1); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,53) dan jasa (2,37). Kelima sektor ini merupakan sektor basis yang dimungkinkan untuk dilakukan ekspor ke daerah lain di luar Kota Blitar. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kelima sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan merupakan sektor potensial di mana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga memiliki berpengaruh yang kuat terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar

Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,48); pertambangan dan penggalan (0,01); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,92) merupakan sektor non basis. Sektor-sektor ini belum mampu memenuhi kebutuhan

dalam Kota Blitar, bahkan mengimpor dari luar daerah. Sektor non basis bisa berkembang menjadi sektor basis baru dengan adanya dukungan perkembangan dari sektor basis. Maka dari itu, kebijakan yang mendukung sektor basis tidak boleh mengabaikan sektor non basis.

b. Ketepatan Kebijakan Sektoral

Sektor PDRB	Rata-rata LQ	
Pertanian	0,488211703	Non Basis
Pertambangan dan Penggalan	0,010961895	Non Basis
Industri Pengolahan	0,415535854	Non Basis
Listrik, Gas, dan Air	0,921084551	Non Basis
Konstruksi	1,146856857	Basis
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,029205031	Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	2,100707997	Basis
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,539460221	Basis
Jasa	2,37586653	Basis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang merupakan sektor basis adalah sektor konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa. Maka kebijakan sektoral kota Blitar sudah tepat karena kebijakan tersebut mendukung perkembangan potensi pariwisata yang masuk dalam kategori jasa, dan perdagangan yang merupakan sektor basis Kota Blitar. Di antara keduanya yang memiliki nilai tinggi adalah sektor jasa.

c. Nilai Indeks Analisis Shift Share potensi ekonomi jasa dan perdagangan

Sektor PDRB	Proportional Shift (P_j)	Differential Shift (D_j)
Pertanian	74829047	-5639632,83
Pertambangan dan Penggalan	280411,38	-377253,583
Industri Pengolahan	106493661	897206,007
Listrik, Gas dan	12959887	1406789,78

Air		
Konstruksi	37665162	4278238,83
Perdagangan, Hotel dan Restoran	249862200	33779464,5
Pengangkutan dan Komunikasi	106674244	-35682800,3
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	110710513	-17268921,2
Jasa	193632151	-29265543,7

Dari tabel di atas dapat dilihat sektor-sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari provinsi adalah sektor yang nilai Propotinal Shifnya bernilai positif yaitu semua sektor dalam PDRB. Nilai tertinggi yaitu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran menyusul kemudian sektor jasa. Dengan demikian sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa harus didukung kebijakan untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi lagi.

Untuk melihat sektor-sektor yang memiliki daya saing adalah sektor yang nilai *Differential Shift*nya bernilai positif yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air; konstruksi; dan perdagangan, hotel dan restoran. Yang mempunyai daya saing tertinggi adalah sektor industri pengolahan, dan terendah adalah sektor listrik, gas dan air.

Sedangkan *Differential Shift* yang bernilai negatif, yang menandakan tidak mempunyai daya saing adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa. Dari sektor-sektor tersebut yang paling rendah daya saingnya adalah sektor pariwisata yang memiliki nilai negatif terbanyak.

Dari kesimpulan di atas mengenai potensi yang memiliki daya saing, yang perlu didukung dengan kebijakan adalah sektor jasa yang termasuk di dalamnya sektor pariwisata yang perannya sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kota Blitar, karena daya saingnya sangat rendah walaupun sektor jasa ini merupakan sektor basis. Perlu kebijakan untuk mengembangkan dan mendorong sektor ini untuk

mencapai tujuan peningkatan daya saing sesuai dengan penjelasan visi kota Blitar.

d. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Blitar selain memperhatikan keselarasan dengan visi misi dan membutuhkan konsistensi kebijakan, perlu ditekankan juga bahwa kemajuan di sektor pariwisata akan berdampak kenaikan pendapatan asli daerah karena pariwisata merupakan lokomotif penggerak perekonomian, selain itu pengembangan sektor pariwisata sangat memungkinkan adanya penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang berimplikasi akan menaikkan kenaikan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadikan semakin meningkatnya potensi pada sektor perdagangan dan jasa yang sudah merupakan sektor basis, dan juga sebagai pendorong meningkatnya sektor-sektor lain untuk menjadi sektor basis yang baru. Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian Kota Blitar secara umum

e. Advokasi Kebijakan

Kebijakan pengembangan daerah Kota Blitar dapat difokuskan pada pariwisata budaya yang selaras dengan tujuan pengembangan Kota Blitar sebagai "Laboratorium Kebangsaan" dapat dimulai dengan pengembangan kreatif atau penciptaan wisata yang belum ada sesuai dengan jenis-jenis pariwisata yang sudah dikemukakan di atas, antara lain:

1. Wisata budaya, yang bisa meliputi kegiatan Grebek Pancasila yang sudah ada, pertunjukan tari-tarian tradisional Jawa Timur, khususnya Tari Emprak yang merupakan tari khas dari daerah masyarakat Blitar, pagelaran wayang kulit, wayang orang, campur sari, gendhing-gendhing Jawa, ludruk, ketoprak.
2. Wisata dengan obyek bisnis, yang bisa meliputi pengadaan seminar kebudayaan dengan pembahasan kebudayaan Jawa, terutama Jawa Timur. Tempat seminar bisa

- menggunakan ruangan seminar dari Perpustakaan Bung Karno yang sudah tersedia fasilitas seminar di sana.
3. Wisata Komersial, bisa dengan pengadaan *expo* atau bazar perdagangan dengan tujuan mengenalkan dan memperdagangkan barang-barang khas daerah Blitar seperti Kendang Jimbe, batik khas Blitar, tas anyaman dari bambu dan rumput, aksesoris-aksesoris kerajinan dari kayu, makanan-makanan khas Blitar seperti Sambel Pecel, Belimbing Karangsari, Nanas dan Rambutan.
 4. Wisata Sejarah. Kota Blitar banyak sekali memiliki tempat wisata sejarah, seperti Makam Bung Karno berikut orang tuanya, makam Aryo Blitar pendiri Kota Blitar, rumah masa kecil Bung Karno Ndalem Gebang, museum PETA.
 5. Wisata Olahraga. Bisa dikembangkan dengan pertunjukan kembali permainan-permainan tradisional yang mungkin sudah hilang, ini tentunya menjadi daya tarik sendiri yang unik nantinya seperti kasti, enthik, gobak sodor, sepeda onthel, egrang.
 6. Wisata Kuliner. Wisata kuliner bisa diadakan dengan festival makanan tradisional dan dikembangkan tidak hanya dengan makanan khas Blitar, tetapi dikembangkan menjadi makanan tradisional yang lain juga yang masih berhubungan dengan budaya Jawa. Untuk kota Blitar sendiri memiliki makanan khas yang terkenal yaitu pecel Blitar, Wajik Kletik. Bisa dikembangkan dengan makanan tradisional lain seperti ketela, tape, jajanan pasar lain yang tersedia berbagai macam rasa dan varian.
 7. Agro wisata. Wisata ini bisa dipusatkan di Kelurahan Karangsari yang di sana terdapat produksi buah belimbing, dan bisa ditambah dengan varian buah rambutan dan nanas yang terkenal dari Blitar.

Advokasi kebijakan di atas, ditunjukkan juga dalam analisis SWOT sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan)
 - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat yang selanjutnya meningkatkan perekonomian secara umum.
 - Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
 - Meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat setempat
 - Meningkatkan rasa percaya diri dengan budaya bangsa terutama budaya-budaya tradisional.
2. *Weaknesses* (kelemahan)
 - Membutuhkan biaya yang banyak untuk menyelenggarakan
3. *Opportunities* (peluang)
 - Menjadi inspirasi kebijakan untuk daerah lain
 - Mengenalkan Blitar ke seluruh daerah, bahkan internasional
 - Terbunya peluang investasi bagi investor
 - Terbukanya pasar wisata bagi masyarakat domestik dan mancanegara
4. *Threats* (ancaman)
 - Masuknya budaya-budaya baru yang dibawa wisatawan
 - Meningkatnya tingkat kriminalitas

Kesimpulan

Kebijakan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menciptakan wisata-wisata tradisional yang baru dan digabungkan dengan yang sudah ada, dan yang lebih utama dengan mengencarkan promosi pariwisata dengan berbagai media yang ada untuk menarik sebanyak-banyaknya kunjungan wisatawan dan juga untuk pengenalan kepada pengusaha untuk peluang berinvestasi. Pengembangan pariwisata perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan program “Bulan Wisata” di mana di bulan tersebut akan diadakan banyak sekali agenda wisata yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan wisata yang baru maupun yang sudah ada dan diadakan rutin setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, Arief dan Hafizrianda. (2010) **Metode Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi**. Bogor, IPB Press.
- Sumihardjo, Tumar. (2008) **Daya Saing Berbasis Potensi Daerah**. Bandung, Fokus Media.
- Bappeda. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar** [Internet] Available from: <bappedakotablitar.go.id> [Accessed: 4 April 2012]